

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, OPINI AUDIT, DAN
LEVERAGE TERHADAP AUDIT DELAY
(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat)**

Maidelfian Putra Bakar¹, Fefri Indra Arza²

¹Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

²Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

*Korepondensi: maidelfiranputra@gmail.com

Abstract: *Local governments are obliged to ensure that their financial statements are presented in a timely manner as they are a form of accountability to the public. These financial reports can be used by the public to evaluate the capabilities of local governments in managing their resources effectively and efficiently. Financial statements that were not provided on time may cause those report loses their capacity to influence decisions. The study was categorized into causative research. Where this study aims to see how far the independent variables affect the dependent variable. This research tries to explain the influence of local government size (X1), audit opinion (X2) and leverage (X3) as independent variable to audit delay (Y) as dependent variable. The population observed in this study is from regencies and cities in West Sumatera in 2015 and 2017. The result of this study shows that the audit opinion variable cause significant negative effect on audit delay. The local government size and the leverage variable doesn't affect audit delay. This study also shows that local government size, audit opinion, and leverage together influence audit delay.*

Keywords: *Audit delay; Leverage; Opini Audit; Ukuran Pemerintah Daerah*

How to cite (APA 6th style)

Bakar, M.P., & Arza, F.I. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan *Leverage* terhadap *Audit Delay* (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), Seri C, 1168-1183.

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah atas kinerja keuangan terhadap masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan adanya sistem pelaporan yang baik dan berguna bagi masyarakat dan pemakai laporan keuangan lainnya. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 (PP No. 71 Tahun 2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menyatakan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna.

Dalam SAP juga dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan. Ketika mengacu pada pelaporan keuangan perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangannya secara tepat waktu, sudah seharusnya pelaporan keuangan pemerintah dapat melakukan hal yang sama atau bahkan lebih baik. Pelaporan dikatakan tepat waktu adalah ketika pelaporan tersebut disampaikan atau dipublikasikan pada saat yang tepat untuk memungkinkan para pengambil keputusan menggunakannya dalam membuat keputusan (Romney dan Steinbart, 2009 dalam Fabio Akbar, 2017).

Menurut Mohamad (2012) dalam Muladi (2014), pemerintah daerah berkewajiban untuk memastikan bahwa laporan keuangan mereka disajikan secara tepat waktu karena laporan keuangan tersebut merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan dapat digunakan oleh publik untuk mengevaluasi kapabilitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) menyatakan “Gubernur/bupati/walikota wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)”.

Selanjutnya, ketepatan waktu penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut menerangkan bahwa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, kepala daerah wajib menyampaikan LKPD kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan dan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah laporan tersebut diterima dari pemerintah daerah, BPK wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tersebut kepada DPRD, sehingga waktu maksimum untuk menghasilkan LKPD *audited* adalah lima bulan sejak tahun anggaran berakhir (Lase dan Sutaryo, 2014 dalam Rachmawati dkk., 2016).

Audit delay merupakan keterlambatan penyampaian LHP kepada DPRD. Pemerintah daerah dan BPK harus melaksanakan tugasnya masing-masing dalam batas waktu yang telah ditentukan di atas dengan baik agar tidak terjadi *audit delay*, sehingga LHP dapat diserahkan pada DPRD secara tepat waktu. Carslaw dan Kaplan (1991) menjelaskan bahwa *audit delay* dapat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kapan audit dimulai dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit tersebut. Kapan dimulainya audit tergantung kapan laporan keuangan diserahkan kepada auditor (BPK). Sehingga lamanya waktu pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK dapat memengaruhi lamanya *audit delay*.

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa *audit delay* memiliki peranan yang sangat penting dalam memengaruhi kinerja pemerintah dan kepentingan para pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk membuat keputusan. Namun, hingga saat sekarang ini di Indonesia penelitian mengenai *audit delay* di sektor pemerintah masih sedikit ditemukan. Penelitian *audit delay* sebelumnya lebih banyak dilakukan di sektor swasta, yaitu pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Muladi, 2014). Berdasarkan hal tersebut penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian terkait *audit delay* pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menekan *audit delay* pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat sehingga ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah dapat ditingkatkan dan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi fungsinya dalam memberikan informasi yang bermanfaat kepada para penggunanya.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen. Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan (Eisenhardt, 1989; dalam Rachmawi, 2016). Pertama adalah masalah keagenan yang timbul pada saat (a) keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan dari prinsipal dan agen berlawanan dan (b) merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh agen. Permasalahannya adalah bahwa prinsipal tidak dapat memverifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu secara tepat. Kedua adalah masalah pembagian risiko yang timbul pada saat prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Dengan demikian, prinsipal dan agen mungkin memiliki preferensi tindakan yang berbeda dikarenakan adanya perbedaan preferensi risiko.

Teori keagenan tidak hanya berkaitan dengan hubungan pemegang saham dan manajemen. Teori keagenan juga tidak hanya relevan dalam organisasi komersial. Hubungan yang dijelaskan dalam teori keagenan dapat terjadi pada berbagai organisasi termasuk dalam organisasi pemerintahan. Asumsi tentang sifat manusia, hubungan antar anggota organisasi, dan asimetri informasi juga relevan dalam teori keagenan pada organisasi pemerintahan. Dalam organisasi pemerintahan, publik adalah prinsipal. Dalam hal ini publik diwakili oleh dewan (DPRD), sedangkan pengelola atau manajemen adalah pemerintah (Siregar, 2015).

Dalam kasus pemerintah daerah, DPRD memonitor pemerintahan yang dilakukan oleh gubernur, bupati, atau walikota. Prinsipal memonitor kerja agen agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien serta tercapainya akuntabilitas publik. Mardiasmo (2009) dalam bukunya mengatakan akuntabilitas publik itu sendiri menjelaskan bahwa kewajiban agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada prinsipal yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu akuntabilitas vertikal (*Vertical Accountability*) yang merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada MPR, dan Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*) yang merupakan pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat luas (publik).

Dalam penerapan teori keagenan, *audit delay* perlu diperhatikan. *Audit delay* mempunyai hubungan erat dengan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan, karena manfaat informasi laporan keuangan menjadi kurang relevan bagi para pengguna apabila laporan tersebut tidak disampaikan secara tepat waktu. Informasi harus disajikan tepat waktu bagi pengambil keputusan sebelum mereka kehilangan kesempatan/kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil (*timeliness*) (Ghozali dan Chariri, 2007; dalam Muladi, 2014). Ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara informasi yang ingin disajikan

dengan pelaporan, apabila informasi tersebut tidak disampaikan tepat waktu mengakibatkan berkurangnya nilai informasi yang disampaikan kepada prinsipal yang akan menimbulkan adanya *asymmetric information*. *Asymmetric information* merupakan salah satu elemen teori keagenan, dalam hal ini pihak agen lebih banyak mengetahui informasi internal secara detail dibandingkan pihak prinsipal yang hanya mengetahui informasi secara eksternal melalui hasil kinerja yang dibuat oleh agen. Oleh karena itu, hal ini memerlukan ketepatan waktu untuk mengurangi adanya ketidaksesuaian informasi (*asymmetric information*) antara pihak agen dengan pihak prinsipal, sehingga laporan keuangan dapat disampaikan secara transparan kepada prinsipal.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu bentuk informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas pada suatu periode dan disajikan secara terstruktur. Laporan keuangan disajikan dengan tujuan memenuhi kebutuhan pengguna agar dapat dijadikan pijakan dalam mengambil keputusan, dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen dalam mengelola entitas yang telah dipercayakan.

Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberikan informasi sebagai pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, dan sebagai bukti pertanggungjawaban pengelolaan, serta untuk memberi informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Audit Delay

Audit delay adalah rentang waktu lamanya hari dalam menyelesaikan proses audit oleh auditor dari tanggal tutup buku pada tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan auditor (Carslaw dan Kaplan, 1991). Hal senada juga dikatakan oleh Payne dan Jensen (2002) yang mengatakan bahwa *audit delay* adalah rentang waktu antara akhir tahun buku pemerintah daerah dengan penyelesaian laporan audit keuangan. Halim (2000) juga mengatakan bahwa *audit delay* didefinisikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. Carslaw dan Kaplan (1991) mengemukakan bahwa *audit delay* dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu kapan audit dimulai dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin lama pemerintah pusat atau pemerintah daerah menyerahkan laporan keuangannya kepada BPK dan kinerja yang kurang baik dari BPK, maka kemungkinan untuk muncul *audit delay* yang panjang semakin besar.

Ukuran Pemerintah Daerah dan *Audit Delay*

Pemerintahan yang memiliki aset yang lebih besar melaporkan lebih cepat dibandingkan dengan pemerintahan yang memiliki aset yang lebih kecil. Mereka beranggapan bahwa pemerintahan yang memiliki sumber daya atau aset yang besar memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi, sistem informasi yang lebih canggih, sistem pengendalian internal yang lebih kuat, adanya pengawasan dari investor, regulator dan sorotan

masyarakat yang memungkinkan pemerintahan untuk melaporkan laporan keuangan auditannya lebih cepat ke publik (Siregar, 2015). Hal tersebut di dukung oleh penelitian Courtis di New Zealand (1976), Gilling (1977), Davies dan Whitter di Australia (1980), dan lain sebagainya dalam Imami (2001) yang menunjukkan bahwa *audit delay* memiliki hubungan negatif dengan ukuran pemerintahan. Artinya bahwa semakin besar aset pemerintahan maka semakin pendek *audit delay*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Opini Audit dan Audit Delay

Opini Audit merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh auditor atas hasil audit laporan keuangan tahunan pada akhir periode, pendapat ini dapat menjadi sebuah penilaian akan kesuksesan suatu kinerja pemerintah daerah. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima pemerintah daerah dari auditor menunjukkan bahwa tidak banyak salah saji yang ditemukan oleh auditor pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut telah menyusun laporan keuangannya dengan baik dan sesuai standar.

Penyusunan laporan keuangan yang baik dapat menjadi cerminan bahwa daerah tersebut telah memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Daerah yang telah memiliki tata kelola pemerintahan yang baik tentunya akan memiliki sistem penyusunan laporan keuangan yang baik sehingga waktu yang dibutuhkan dalam menyusun laporan keuangan akan lebih singkat. Semakin singkat daerah dalam menyusun laporan keuangannya dan semakin cepat laporan keuangan disampaikan kepada BPK untuk diperiksa maka akan semakin pendek pula *audit delay* yang terjadi (Hardini, 2016). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan McLelland dan Giroux (2000), Payne dan Jensen (2002), dan Muladi (2014) yang menunjukkan bahwa opini non-WTP seperti Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*) akan meningkatkan *audit delay*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₂: Opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Leverage dan Audit Delay

Leverage adalah pengukuran kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Apabila perusahaan memiliki rasio *leverage* yang tinggi maka risiko kerugian perusahaan akan bertambah. Oleh sebab itu, untuk memperoleh keyakinan akan laporan keuangan perusahaan maka auditor akan meningkatkan kehati-hatiannya sehingga rentang *audit delay* akan lebih panjang (Angruningrum dan Wirakusuma, 2013).

Semakin tinggi tingkat *leverage* maka tingkat *audit delay* semakin rendah. Hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* maka tingkat utang juga semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat utang maka semakin banyak kreditor yang mengawasi kinerja pemerintahan sehingga pemerintahan akan lebih cepat untuk menyusun laporan keuangannya karena pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap dana yang diberikan oleh kreditor (Siregar, 2015). Semakin cepat pemerintahan menyusun laporan keuangannya maka akan semakin cepat pula BPK dalam melaksanakan proses auditnya dan diduga dapat mengurangi *audit delay*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₃ : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

METODE PENELITIAN

Penelitian kausatif merupakan penelitian hubungan yang bersifat sebab akibat dengan dua variabel atau lebih (Sugiyono 2008:11). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu ukuran pemerintah daerah, opini audit, dan *leverage*. Sedangkan variabel dependennya adalah *audit delay*. Pengukuran variabel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Pengukuran Variabel

No.	Variabel	Akronim	Pengukuran
1.	<i>Audit delay</i>	AD	Jumlah hari antara tanggal tutup buku tahun anggaran pemerintah daerah dengan tanggal diterbitkannya LHP oleh BPK
2.	Ukuran pemerintah daerah	UPD	Logaritma natural dari total aset yang dimiliki oleh pemerintahan tersebut
3.	Opini audit	OA	Menggunakan variabel <i>dummy</i> ; kode 1 untuk opini WTP dan kode 0 untuk opini non-WTP
4.	<i>Leverage</i>	LEV	Menggunakan <i>debt to total asset ratio</i>

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah seluruh kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2015 sampai tahun 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 19 kabupaten/kota. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *total sampling*, yaitu pengambilan sampel yang jumlahnya sama dengan jumlah populasi yang ada. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data dari tahun anggaran 2015-2017 yang berarti sampel yang didapat adalah sebanyak 57 data. Namun, terdapat 5 data yang teridentifikasi sebagai outlier. Jadi, total sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 52 data. Berikut adalah tabel yang menjelaskan pengambilan sampel:

Tabel 2
Pengambilan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1.	Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2017	57
2.	Data outlier	(5)
	Jumlah	52

Sumber: data yang diolah

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis data dengan menggunakan statistik deskriptif dan korelasi antar variabel penelitian yang menunjukkan nilai maksimum, minimum, mean dan standar deviasi dari setiap variabel independen dan dependen yang dijabarkan dalam bentuk statistik (Ghozali, 2013). Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu

Audit Delay (AD), Ukuran Pemerintah Daerah (UPD), Opini Audit (OA) dan *Leverage* (LEV). Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah prasarat yang harus dipenuhi dalam melakukan regresi linear. Pengujian asumsi klasik ini digunakan agar variabel bebas sebagai estimator atas variabel terikat tidak bias (Ghozali, 2013). Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen telah terdistribusi dengan normal. Ghozali (2013) menjelaskan alat uji normalitas yang digunakan untuk menguji data yang berdistribusi normal adalah *One Sample Kolmogorov-Smirnov*. Pada uji *Kolmogorov-Smirnov*, jika nilai *asympt Sig (2-tailed) > 0,05* maka H0 diterima (berdistribusi normal) sedangkan jika nilai *asympt Sig (2-tailed) < 0,05* maka H0 ditolak (tidak berdistribusi normal).

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Pengujian terhadap multikolinieritas dideteksi dengan menggunakan nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai VIF < 10 maka tidak terdapat masalah multikolinieritas (Ghozali 2013). Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (nilai *error*nya). Menguji ada atau tidaknya masalah heteroskedastisitas pada penelitian ini digunakan uji Spearman's rho. Dasar pengambilan keputusan untuk uji heteroskedastisitas dengan Spearman Rho adalah jika nilai signifikansi atau *Sig. (2-tailed) > nilai 0,05* maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi atau *Sig. (2-tailed) < nilai 0,05* maka dapat dikatakan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas.

Menurut Ghozali, (2013) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Terdapat beberapa cara untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi, diantaranya yaitu dengan menggunakan uji Durbin-Watson (*DW-Test*). Uji Durbin-Watson digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya konstanta (*intercept*) dalam model regresi dan tidak ada variabel *lag* di antara variabel independen.

Pengujian Hipotesis

Kekuatan hubungan antara *audit delay* dengan variabel-variabel independen dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan model regresi linear berganda dengan terlebih dahulu dilakukan statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Adapun model regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$AD = \alpha + \beta_1UPD + \beta_2OA + \beta_3LEV + e$$

Keterangan :

AD = *Audit Delay* (Y)

α = Konstanta

$\beta_1... \beta_3$ = Koefisien Regresi

UPD = Ukuran Pemerintah Daerah (X1)

OA = Opini Audit (X2)

LEV = *Leverage* (X3)

e = *Error term*

Kemudian untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel independen dengan *audit delay* maka dilakukan pengujian-pengujian hipotesis penelitian terhadap variabel-variabel dengan pengujian di bawah ini :

Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai koefisien determinasi mendekati nol berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu (1) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2013).

Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Jika probabilitas < taraf signifikansi 5% maka H₀ ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas secara parsial (individual) terhadap variabel terikatnya. Namun, jika probabilitas > taraf signifikansi 5% maka H₀ diterima dan H_a ditolak artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas secara parsial (individual) terhadap variabel terikatnya.

Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji f)

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel independen terhadap variabel dependen memiliki pengaruh secara bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima yang berarti secara bersama-sama variabel UPD, OA, dan LEV berpengaruh terhadap *audit delay*. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak yang berarti secara bersama-sama variabel UPD, OA, dan LEV tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AD	52	135,00	173,00	148,3269	8,98740
UPD	52	27,19	29,59	28,0727	,45952
OA	52	,00	1,00	,8462	,36432
LEV	52	,00	,05	,0099	,01085
Valid N (listwise)	52				

Sumber: Hasil Output SPSS, 2019

Hasil di atas menjelaskan variabel-variabel dalam penelitian ini. Variabel AD (Y) memiliki rata-rata (*mean*) 148,32 hari. Nilai tertinggi variabel *audit delay* adalah 173 hari, nilai terendah adalah 135 hari dan standar deviasi sebesar 8,98. Variabel UPD (X1) memiliki rata-rata sebesar 28,07. Nilai tertinggi sebesar 29,59 dan nilai terendah sebesar 27,19. Standar deviasi variabel UPD adalah sebesar 0,46. Variabel OA (X2) memiliki rata-rata sebesar 0,84. Nilai tertinggi sebesar 1, nilai terendah sebesar 0 dan standar deviasi sebesar 0,36. Variabel LEV (X3) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0099. Nilai tertinggi sebesar 0,05 dan nilai terendah sebesar 0,00 dikarenakan ada beberapa data yang memiliki nilai < 0,01. Standar deviasi variabel LEV adalah sebesar 0,01.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berikut tabel hasil uji normalitas menggunakan program SPSS:

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,2336160
	Std. Deviation	6,71931344
Most Extreme Differences	Absolute	,154
	Positive	,095
	Negative	-,154
Kolmogorov-Smirnov Z		1,111
Asymp. Sig. (2-tailed)		,169

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Hasil Output SPSS, 2019

Berdasarkan hasil uji normalitas pada penelitian ini didapatkan bahwa nilai *asympt Sig (2-tailed)* adalah 0,169 yang mana > $\alpha=0,05$. Hal ini berarti H_0 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal dan model regresi yang digunakan baik, sehingga penelitian layak untuk dilanjutkan.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
(Constant)	247,947	54,441		4,554	,000			
1	UPD	-3,037	1,942	-,155	-1,564	,124	,970	1,031
	OA	-17,561	2,472	-,712	-7,104	,000	,952	1,050
	LEV	48,889	83,362	,059	,586	,560	,944	1,059

a. Dependent Variable: AD

Sumber: Hasil Output SPSS, 2019

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini diketahui bahwa setiap variabel bebas memiliki nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi ini.

Uji Autokorelasi

Tabel 6
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,736 ^a	,541	,512	6,27590	2,266

a. Predictors: (Constant), LEV, UPD, OA. b. Dependent Variable: AD

Sumber: Hasil Output SPSS, 2019

Nilai du dicari pada distribusi nilai tabel Durbin Watson berdasarkan k=3, N=52 dengan signifikansi $\alpha=0,05$. Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada penelitian ini didapat nilai du (tabel) = 1,6769 < Durbin-Watson(hitung) = 2,266 < nilai (4-du) = 2,3231. Jadi, dapat disimpulkan tidak ada gejala autokorelasi dan uji regresi linear berganda dapat dilanjutkan.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 7
Hasil Uji Heterokedastisitas
Correlations

			Unstandardized Residual	UPD	OA	LEV
Spearman's rho	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	1,000	-,037	,174	,222
		Sig. (2-tailed)	.	,796	,217	,114
		N	52	52	52	52
UPD		Correlation Coefficient	-,037	1,000	,064	-,031
		Sig. (2-tailed)	,796	.	,652	,828
		N	52	52	52	52
OA		Correlation Coefficient	,174	,064	1,000	,162
		Sig. (2-tailed)	,217	,652	.	,251
		N	52	52	52	52
LEV		Correlation Coefficient	,222	-,031	,162	1,000
		Sig. (2-tailed)	,114	,828	,251	.
		N	52	52	52	52

Sumber: Hasil Output SPSS, 2019

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas pada penelitian ini diperoleh nilai signifikansi atau *Sig. (2-tailed)* variabel UPD (X1) sebesar 0,796, variabel OA (X2) sebesar 0,217, dan variabel LEV (X3) sebesar 0,114. Karena nilai semua variabel independen (X) lebih besar dari nilai $\alpha=0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala heteroskedastisitas. Artinya model regresi yang dipakai untuk penelitian ini layak untuk dilanjutkan.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8
Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	247,947	54,441		4,554	,000		
	UPD	-3,037	1,942	-,155	-1,564	,124	,970	1,031
	OA	-17,561	2,472	-,712	-7,104	,000	,952	1,050
	LEV	48,889	83,362	,059	,586	,560	,944	1,059

a. Dependent Variable: AD

Sumber: Hasil Output SPSS, 2019

Berdasarkan tabel di atas, didapat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$AD = 247,947 - 3,037 \text{ UPD} - 17,561 \text{ OA} + 48,889 \text{ LEV}.$$

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut:

- Konstanta = 247,947. Ini berarti jika variabel Ukuran Pemerintah Daerah (UPD), Opini Audit (OA), dan *Leverage* (LEV) dianggap sama dengan nol, maka variabel *audit delay* (Y) sebesar 247,947.
- Koefisien $X_1 = -3,037$. Ini berarti bahwa rata-rata lamanya *audit delay* pada kabupaten/kota di Sumbar selama tahun 2015-2017 yang memiliki jumlah aset yang lebih besar dengan kabupaten/kota yang memiliki jumlah aset yang lebih kecil adalah 3 hari dimana kabupaten/kota yang memiliki jumlah aset yang lebih besar akan mengurangi tenggang waktu *audit delay* (Y) selama 3 hari.
- Koefisien $X_2 = -17,561$. Ini berarti bahwa rata-rata lamanya *audit delay* pada kabupaten/kota di Sumbar selama tahun 2015-2017 yang mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan perusahaan yang mendapatkan opini audit selain WTP adalah 17,6 hari dimana kabupaten/kota yang mendapatkan opini audit WTP akan mengurangi tenggang waktu *audit delay* (Y) selama 17,6 hari.
- Koefisien $X_3 = 48,889$. Ini berarti jika nilai variabel *leverage* (LEV) mengalami kenaikan sebesar satu poin, sementara variabel UPD dan OA dianggap tetap, maka akan menambah tenggan waktu *audit delay* (Y) selama 48,9 hari.

Uji Hipotesis
Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Tabel 9
 Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)
 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,736 ^a	,541	,512	6,27590	2,266

a. Predictors: (Constant), LEV, UPD, OA

b. Dependent Variable: AD

Sumber: Hasil Output SPSS, 2019

Dari tabel di atas didapat nilai *Adjusted R²* sebesar 0,512. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel ukuran pemerintah daerah (X1), opini audit (X2) dan *leverage* (X3) terhadap *audit delay* (Y) sebesar 51,2%. Berarti 51,2% faktor yang berpengaruh terhadap *audit delay* dapat dijelaskan oleh ukuran pemerintah daerah, opini audit, dan *leverage*. Sedangkan sisanya 48,8% lagi dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Hasil pengujian dengan program SPSS seperti yang terlihat pada Tabel 8 yaitu pada variabel ukuran pemerintah daerah (X1) diperoleh nilai $t_{hitung} = -1,564 < 1,67 = t_{tabel}$ dan $sig = 0,124 > 0,05\%$ jadi H_0 diterima. Ini berarti variabel ukuran pemerintah daerah secara statistik tidak berpengaruh terhadap variabel *audit delay* (Y). Pada variabel opini audit (X2) diperoleh nilai $t_{hitung} = -7,104$ dengan nilai $sig = 0,000 < 0,05$ jadi H_0 ditolak dan H_a diterima, ini berarti variabel opini audit secara statistik berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel *audit delay* (Y). Pada variabel *leverage* (X3) diperoleh nilai $t_{hitung} = 0,586 < 1,67 = t_{tabel}$ dan $sig = 0,560 > 0,05$ jadi H_0 diterima. Ini berarti variabel *leverage* secara statistik tidak berpengaruh terhadap variabel *audit delay* (Y).

Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji f)

Tabel 10
 Hasil Uji f
 ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2228,873	3	742,958	18,863	,000 ^b
Residual	1890,570	48	39,387		
Total	4119,442	51			

a. Dependent Variable: AD

b. Predictors: (Constant), LEV, UPD, OA

Sumber: Hasil Output SPSS, 2019

Dari tabel di atas terlihat nilai sig. yang diperoleh sebesar 0,000 yang mana $\leq 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu ukuran pemerintah daerah, opini audit, dan

leverage secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu *audit delay*.

Pembahasan

Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini menyebutkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial yang telah dilakukan, diperoleh keterangan bahwa H1 ditolak yang berarti bahwa variabel ukuran pemerintah daerah tidak terbukti berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini berarti besar atau kecil ukuran pemerintah daerah bukan menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan dan berakibat pada bertambahnya tenggang waktu *audit delay*, karena unsur kepatuhan pada peraturan yang berlaku dan pengawasan dari agen (DPRD dan masyarakat) mengharuskan pemerintah daerah untuk tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan (Fabio Akbar, 2017).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Muladi (2014) yang melakukan penelitian mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay* Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang menyimpulkan bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Selain itu hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh Marni, dkk. (2019) mengenai Pengaruh Ukuran Pemerintah, Opini Audit, dan *Incumbent* Terhadap *Audit Delay* Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia yang menyimpulkan bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Siregar (2015) yang melakukan penelitian mengenai Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap *Audit Delay* Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menyimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap *audit delay* laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Hardini dan Sukirman (2016), Fabio Akbar (2017) dan Syahyuni (2018).

Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini menyebutkan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial yang telah dilakukan, diperoleh keterangan bahwa H2 diterima. Kemungkinan penyebab opini audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *audit delay* yaitu banyaknya pemerintah daerah di Sumbar yang mendapat opini audit yang baik (WTP). Opini WTP yang diberikan oleh BPK dapat menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah tersebut memiliki salah saji materiil yang cenderung kecil dan dapat menjadi gambaran bahwa daerah tersebut memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah daerah akan lebih cepat dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangannya kepada BPK dan diduga dapat mengurangi tenggang waktu *audit delay* yang terjadi.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Hardini dan Sukirman (2016) yang meneliti tentang Analisis Determinan *Audit Delay* Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muladi (2014), Fabio Akbar (2017) dan Marni, dkk. (2019). Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amy (2016) yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini menyebutkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial yang telah dilakukan, diperoleh keterangan bahwa H3 ditolak. *Debt to total asset ratio* sebagai ukuran *leverage* mengindikasikan tingkat kesehatan keuangan suatu pemerintah daerah. Dalam penelitian ini tingkat kesehatan keuangan pemerintah tidak menyebabkan terjadinya *audit delay*. Hal ini diduga karena rendahnya tingkat *debt to total asset ratio*, berarti rata-rata utang

pemerintah daerah di Sumbar terbilang kecil jika dibandingkan dengan total aset yang dimilikinya. Dengan demikian, besar atau kecilnya tingkat utang tidak menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya kepada BPK, BPK sebagai pemeriksa juga akan berusaha untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Akbar (2017) yang meneliti tentang Analisis Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan *Leverage* Terhadap *Audit Delay*. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Carslaw dan Kaplan (1991) dan Siregar (2015).

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hipotesis pertama tidak terdukung dalam penelitian ini yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah (X1) tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini dapat dilihat pada nilai tabel analisis regresi linear berganda yang menunjukkan variabel UPD (X1) memiliki nilai sig. sebesar 0,124 yang mana $> \alpha = 0,05$.
- b. Hipotesis kedua terdukung dalam penelitian ini yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel opini audit (X2) berpengaruh signifikan negatif terhadap *audit delay*, artinya pemerintah daerah yang mendapat opini audit yang baik (WTP) akan dapat memperpendek tenggang waktu *audit delay* yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dari nilai tabel analisis regresi linear berganda yang menunjukkan variabel OA (X2) memiliki nilai sig. sebesar 0,000 yang mana $< \alpha = 0,05$.
- c. Hipotesis ketiga tidak terdukung dalam penelitian ini yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *leverage* (X3) tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini dapat dilihat dari nilai tabel analisis regresi linear berganda yang menunjukkan variabel LEV (X3) memiliki nilai sig. sebesar 0,560 yang mana $> \alpha = 0,05$.

Keterbatasan

Penelitian ini telah dirancang dan direncanakan dengan sebaik-baiknya, namun peneliti menyadari masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian ini hanya dilakukan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menyebabkan hasil penelitian mungkin akan berbeda jika dilakukan di wilayah lain, mengingat perbedaan karakteristik masing-masing wilayah di Indonesia.
- b. Penelitian ini hanya dilakukan selama 3 tahun anggaran yaitu tahun 2015 sampai dengan 2017.
- c. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang ada pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa saran. Bagi pemerintah daerah, diharapkan pemerintah daerah lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat mengurangi tenggang waktu *audit delay* agar berkurangnya kasus *audit delay* yang terjadi pada pemerintah daerah. Seperti halnya opini audit yang baik (WTP) pada hasil penelitian ini terbukti dapat memperpendek tenggang waktu *audit delay*. Pemerintah daerah yang mendapat opini audit WTP diharapkan mempertahankannya

dengan sebaik-baiknya dan yang mendapatkan opini audit selain WTP diharapkan dapat meningkatkannya.

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan penelitian selanjutnya lebih dapat memaksimalkan penelitian dengan menambah faktor-faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi *audit delay* seperti: pengalaman pemerintah daerah, tingkat ketergantungan daerah dan akuntabilitas kinerja. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menambah sumber data yang digunakan maupun jangka waktu penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Fabio. 2017. “Analisis Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit dan Leverage Terhadap Audit Delay”. *Skripsi*. Bandar Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Amy, Maulidya. 2016. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Angruningrum, Silvia dan Made G. Wirakusuma. 2013. “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komplexitas Operasi, Reputasi KAP dan Komite Audit pada Audit Delay”. Dalam *E-Journal Akuntansi*. Vol 5 No 2. Hal 251-270 Bali: Universitas Udayana.
- Carslaw, C.A.P.N., and Kaplan, S.E., (1991). “An Examination of Audit Delay: Further Evidence from New Zealand”. *Accounting and Business Research*, Vol. 22. No. 85. pp. 21-32.
- Ghozali, Imam. (2013) “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi”. Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardini, Ziza Gita. 2015. “Pengaruh Akuntabilitas Kinerja, Ukuran Daerah, dan Opini Auditor Terhadap Audit Delay pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Hardini, Z., & Sukirman, S. (2016). “Analisis Determinan Audit Delay Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia”. *Accounting Analysis Journal*, 5(1).
- Hidayat, Shodiq Nur dan Isroah. 2016. “Pengaruh Karakteristik Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan Inflasi Terhadap Return”. *Jurnal Profita*, 6.
- Hilmi, Utari dan Ali, Syaiful. 2008. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di BEJ Periode 2004-2006)”. *Simposium Nasional Akuntansi XI Surabaya*.
- Imam, Shahed. 2001. “Association of Audit Delay and Audit Firms International Links: Evidence from Bangladesh”. *Managerial Auditing Journal*, Volume 16 (3).
- Mardiasmo. 2009. “Akuntansi Sektor Publik”. Penerbit: Andi. Yogyakarta.
- Marni, dkk. 2019. “The Influence of Government Size, Audit Opinion and Incumbent on Audit Delay in the Provincial Government in Indonesia”. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, Vol. 12 No. 2 January 2019, pp. 118-126. Indonesia : Universitas Andalas.
- McLelland, A. dan Giroux, G. 2000. “An Empirical Analysis of Auditor Report Timing by Large Municipalities”. *Journal of Accounting and Public Policy* 19.
- Muladi, Aris. 2014. “Faktor-faktor yang mempengaruhi Audit delay pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

- Payne, J. dan Jensen, K. 2002. "An Examination of Municipal Audit Delay". *Journal of Accounting and Public Policy* 21.
- Rachmawi, S., Rini, Fitri, Y. 2016. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia". *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, Volume 9 (1).
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
- Siregar, Baldric. 2015. "Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap Audit Delay Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". *Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan*, Volume 11 Nomor 2.
- Sugiyono. (2008). "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D". Bandung: Alfabeta.
- Syahyuni, I.E., dkk. 2018. "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Ketergantungan Pemerintah Daerah dan Opini Audit Terhadap Audit Delay". *Skripsi*. Padang: FE UNP.
- Tiono, Ivena dan Yulius Jogi C. 2013. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Report Lag di Bursa Efek Indonesia". *Jurnal Akuntansi Bisnis Universitas Kristen Petra*, 8(2), pp: 65-82.